

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era baru pengadaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengakibatkan di Indonesia akuntansi sektor publik mengalami perkembangan yang semakin cepat. Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan semua daerah mempunyai kemampuan dalam meningkatkan kualitas yang dipunyai guna menarik minat para investor untuk terjun langsung ke daerah dan membuka usaha, yang meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki ekonomi masyarakat.

Penilaian kinerja keuangan dapat dinilai dari laporan realialisasi APBD yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah, dikarenakan semakin tinggi belanja modal yang dikonsumsi maka berbanding lurus dengan tingkat produktifitas perekonomian yang tinggi dalam hal kinerja PEMDA.

Kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan kemampuan daerah tersebut dalam membiayai setiap kegiatan terutama dalam hal keuangan oleh karena perkembangan pembangunan yang pesat yang berasal dari pengalokasian belanja modal yang tepat.

Pendapatan Asli Daerah yaitu sebuah hal paling utama dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD Terhadap APBD sangatlah besar, yang apabila Tingkat PAD semakin besar maka ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat akan semakin minim.

Dana perimbangan atau dana transfer memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencapaian efisiensi dan pemetaan dalam menyediakan pelayanan, dikarenakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat bisa menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pemerintah pusat yang berakibat menurunnya kinerja keuangan.

Pemeriksaan ini dibuat pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara, dikarenakan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten kota Sumatera Utara. Jadi alasan yang demikian judul dari pemeriksaan ini yaitu” **Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Sumatera Utara**”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pemeriksaan ini ialah :

1. Benarkah belanja modal berdampak kepada Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2014-2017?
2. Benarkah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berakibat ke Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Sumatera Utara 2014-2017?

3. Apakah Dana Perimbangan berdampak ke Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Sumatera Utara 2014-2017?
4. Apakah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berakibat kepada Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Sumatera Utara 2014-2017?

1.2 Teori Pengaruh

1.2.1 Belanja Modal

Sudarsana (2013) tingkat belanja modal yang tinggi memberikan gambaran dari infrastuktur dan sarana yang dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, hal tersebut akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang nantinya akan berdampak baik terhadap kinerja daerah. Hal ini membuktikan, semakin tinggi belanja modal maka kinerja keuangan dengan pengukuran rasio efisiensi mengalami peningkatan.

Nugroho (2012) mendefinisikan bahwa semakin besar infrastuktur dikerjakan maka akan menaikkan perkembangan kinerja keuangan daerah seperti pemahaman yang diketahui, jika semakin besar sumber yang didapatkan maka hasilnya pun terus bertambah. Jadi ini berpengaruh negative ke kinerja keuangan daerah secara relevan atau tidak relevan terhadap PAD, belanja modal berdampak jelas kepada kemajuan kinerja keuangan daerah.

Restianto (2011) mengungkapkan kalau belanja modal berdampak positif dan signifikan ke kinerja keuangan. pemeriksaannya sejalan pada pemeriksaan yang dikerjakan Sularso dimana makin naik wewenang otoritas daerah kepada jasa masyarakat, hingga distribusi belanja modal ke pemberi layanan akan makin tinggi kemudian kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi semakin maju.

1.3.2 Pendapatan asli daerah

Menurut Suprianto (2013) mengungkapkan jika secara farsial pendapatan asli daerah berdampak sangat jelas ke kinerja keuangan. Makin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka baik pulalah kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Sumatra Utara.

Menurut Julitawati (2012) mengungkapkan kalau kelebihan satu daerah dalam menggali PAD berdampak terhadap kemandirian daerah, Maka makin tinggi bantuan PAD ke APBD, maka akan makin minimlah keterikatan kepada bantuan pemerintah pusat.

Menurut Sumarjo (2010) menyatakan kalau meningkatnya pendapatan asli daerah menjadi hal pendukung dari kinerja ekonomi, itu menunjukkan makin banyak PAD lalu akan makin besar kinerja keuangan yang dihitung dari rasio efisiensi.

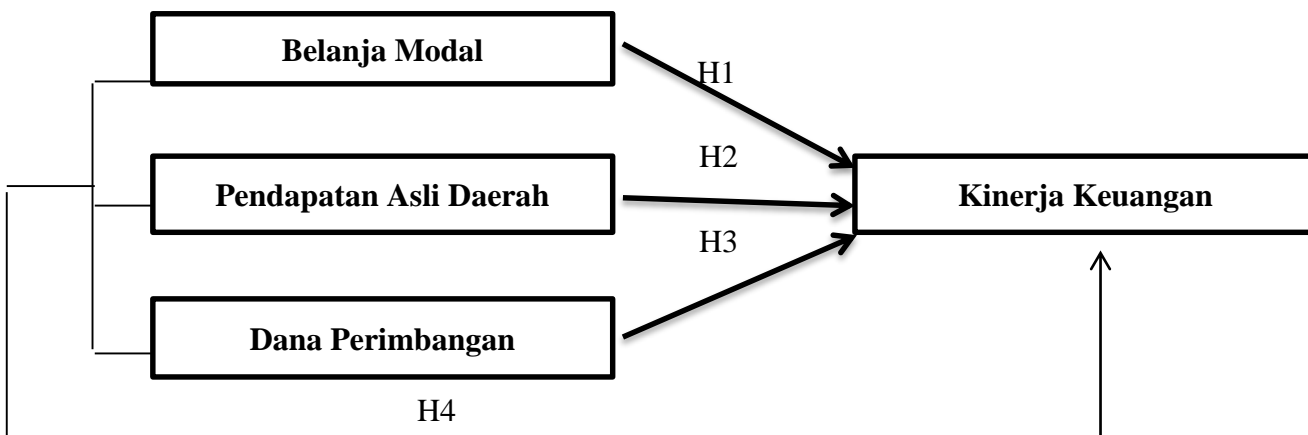
1.3.3 Dana Perimbangan

Menurut Rukmana (2013) memberitahukan kalau dana perimbangan secara farsial berakibat negative kepada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatra

Utara. Semakin tinggi pengiriman dana perimbangan yang didapat, makin naik juga pemerintah daerah berharap pada pemerintah pusat agar terpenuhi kebutuhannya.

Menurut Fisa (2016) mengatakan pemerintah daerah tidak mampu mengerjakan dengan baik dana yang diterima dari pemerintah inti, dana perimbangan tidak berdampak ke kinerja kauangan daerah.

1.3.4 Kerangka konseptual



1.3.5 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka konseptual yang sudah diuraikan pada waktu itu dapat dirumuskan hipotesis pemeriksaan ini yaitu :

- H1 : Belanja modal berdampak secara segmental kepada kinerja keuangan pada Kabupaten/ kota Sumatera Utara periode 2014-2017.
- H2 : Pendapatan asli daerah berakibat secara serentak ke kinerja keuangan pada Kabupaten/kota Sumatera Utara periode 2014-2017.
- H3 : Dana perimbangan berdampak secara parsial ke kinerja keuangan pada Kabupaten/kota Sumatera Utara periode 2014-2017.
- H4 : Belanja modal, Pendapatan asli daerah, dan Dana perimbangan berdampak dengan serentak ke kinerja keuangan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara periode 2014-2017.

